

MAKALAH
KONSEP DAN TEORI NEO LIBERALISME

Disusun untuk Memenuhi Tugas UTS Mata Kuliah Analisis Dampak Pembangunan

Dosen Pengampu : Intan Fitri Muetia, Ph.D.



Disusun Oleh:

Doni Heru Setyawan	2116041046
Dea Amanda Tiara	2116041047
Tamara Putri Pasaribu	2116041054
Febby Afvia Sarumaha	2116041072
Putri Della Puspita	2116041076
Ni'matul lu'lu'in	2116041079
Erya Lukyta Ningtyas	2116041080

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG

2024

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas makalah yang berjudul **Konsep dan Teori Neoliberalisme** ini tepat pada waktunya.

Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas Ujian Tengah Semester (UTS) dalam mata kuliah Analisis dampak Pembangunan. Selain itu, makalah ini bertujuan untuk menambah wawasan tentang Neoliberalisme bagi pembaca dan juga bagi penulis.

Kami mengucapkan terima kasih kepada ibu Intan Fitri Meutia, Ph.D., selaku dosen pengampu mata kuliah Analisis dampak Pembangunan yang memberikan tugas ini. Melalui tugas ini, kami mendapat pemahaman dan wawasan terkait Neo Liberalisme merupakan salah satu ideologi yang memiliki pengaruh besar dalam ranah ekonomi, politik, dan sosial di berbagai belahan dunia.

Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusinya dalam penyusunan makalah ini sehingga kami dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik. Kami menyadari bahwa makalah yang kami tulis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan makalah ini.

Bandar Lampung, 31 Maret 2024

(Penulis)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan masalah.....	1
C. Tujuan.....	2
BAB II.....	3
PEMBAHASAN.....	3
A. Sejarah Teori Neoliberalisme.....	3
B. Konsep Neoliberalisme.....	4
C. Neoliberalisme Menurut Para Ahli.....	5
D. Prinsip Neoliberalisme.....	6
E. Contoh Teori Neoliberalisme.....	7
1. Deregulasi dan Debirokratisasi.....	7
2. Privatisasi BUMN.....	7
3. Free Trade (Pasar Bebas).....	7
4. Komersialisasi Pendidikan Mulai dari Sekolah Dasar (SD) yang bergelar RSBI sampai Perguruan Tinggi Negeri (PTN).....	8
BAB III.....	9
PENUTUP.....	9
A. Kesimpulan.....	9
B. Saran.....	9
DAFTAR PUSTAKA.....	10

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Neoliberalisme adalah sebuah ideologi ekonomi dan politik yang mendominasi dunia selama beberapa dekade terakhir. Neoliberalisme dikenal sebagai pengembangan dari liberalisme yang berakar pada pertempuran kaum *borjuis* terhadap feodalisme pada abad ke-18 dan ke-19, muncul sebagai respons terhadap kegagalan kebijakan ekonomi teknokratis dan intervensionis pada tahun 1960-an. Munculnya konflik kepentingan dan ketidakpuasan terhadap model-model ekonomi yang ada, terutama dipicu oleh krisis stagflasi pada tahun 1970-an di negara-negara maju, menjadi titik balik bagi penyebaran wacana neoliberalisme. Dalam esensinya, neoliberalisme menggabungkan berbagai konsep anti-intervensi dalam konteks historis, politis, dan institusi tertentu, yang kemudian menjadi landasan bagi penekanan pada minimnya campur tangan pemerintah dalam urusan ekonomi dan penekanan pada kebebasan individu. Neoliberalisme menekankan persaingan bebas sebagai solusi atas masalah sosial, dengan lebih mempercayai kekuatan pasar daripada regulasi negara. Hal ini tercermin dalam kebijakan-kebijakan yang meminimalisir intervensi pemerintah dan mempromosikan kebebasan individu, seperti privatisasi, deregulasi, dan pengurangan pajak. Neoliberalisme juga dipengaruhi oleh revival pemikiran ekonomi klasik yang menuntut penghapusan intervensi pemerintah dalam ekonomi, seperti yang diperjuangkan oleh Adam Smith dalam karyanya "*The Wealth of Nations*". Dengan demikian, neoliberalisme tidak hanya menjadi paradigma ekonomi, tetapi juga mempengaruhi ranah politik dan sosial dalam skala global. Milton Friedman, Friedrich Hayek, dan F.A. Hayek, adalah beberapa tokoh kunci dalam pengembangan neoliberalisme. Friedman, dengan teori moneterisme, menekankan pentingnya kontrol inflasi melalui kebijakan moneter. Hayek, dengan kritiknya terhadap sosialisme, mempromosikan kebebasan individu dan pasar bebas sebagai kunci kemajuan. Konsep inti neoliberalisme meliputi deregulasi pasar, privatisasi, peran pemerintah yang terbatas, dan pasar internasional terbuka. Para penganut neoliberalisme, yang terinspirasi oleh ekonom klasik seperti Adam Smith dan David Ricardo, percaya bahwa mekanisme pasar bebas adalah yang paling efisien dalam mengalokasikan sumber daya dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, berbeda dengan liberalisme klasik, neoliberalisme lebih fokus pada pembuatan kebijakan ekonomi konkret.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan sejarah teori Neoliberalisme?
2. Apa konsep dasar dari Neoliberalisme?
3. Bagaimana pandangan para ahli terhadap teori Neoliberalisme?
4. Apa saja prinsip-prinsip utama yang mendasari teori Neoliberalisme?

C. Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan dalam pembuatan makalah ini adalah:

1. Untuk mengetahui perkembangan Sejarah teori Neoliberalisme.
2. Untuk mengetahui konsep dasar dari Neoliberalisme.
3. Untuk mengetahui pandangan para ahli terhadap teori Neoliberalisme.
4. Untuk mengetahui prinsip yang mendasari teori Neoliberalisme.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Sejarah Teori Neoliberalisme

Ideologi neoliberalisme, yang didasarkan pada teori ekonomi neoklasik, mengemukakan bahwa pasar bebas selalu menghasilkan hasil yang jelas secara matematis (Chairman, 2007). Dalam konteks ini, semua angkatan kerja diarahkan untuk terlibat dalam proses produksi barang yang kemudian akan dijual. Sebagai versi lebih modern dari ekonomi liberalisme, neoliberalisme mulai menjadi ideologi yang dominan pada akhir Perang Dunia Kedua, meskipun praktik-praktik yang mendasarinya sudah mulai muncul pada awal abad ke-20. Pemikiran seperti yang diungkapkan oleh Rudolf Hilferding, Nikolai Bukharin, dan Lenin menyoroti bahwa pasar bebas kapitalisme cenderung mengarah pada bentuk monopoli dan imperialisme (Chairman, 2007). Oleh karena itu, intervensi pemerintah dianggap penting untuk memfasilitasi infrastruktur yang mendukung produksi dalam konteks kapitalisme. Pengalaman negara-negara seperti Jerman, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat menunjukkan bahwa intervensi pemerintah dapat menciptakan dasar bagi profitabilitas baru dan akumulasi modal.

Dengan demikian, muncul aliran baru yang mengusung gagasan bahwa campur tangan pemerintah diperlukan untuk melindungi sistem kapitalisme dari kegagalan internalnya. Aliran ini terinspirasi oleh pemikiran ekonom Inggris bernama John Maynard Keynes pada tahun 1930-an, yang mengubah sebagian konsep-konsep ekonomi neoklasik yang sebelumnya dianutnya (Chairman, 2007). Setelah Perang Dunia Kedua, ide-ide Keynesian menjadi populer di kalangan pemodal karena diyakini bahwa berbagai pembatasan dan regulasi akan mendukung proses pengumpulan modal, terutama mengingat pengalaman buruk selama masa Depresi Besar ketika tidak ada pembatasan yang diterapkan.

Friedrich von Hayek dan Milton Friedman tetap setia pada prinsip-prinsip lama dalam pandangan ekonomi mereka. Bahkan, menurut Campbell, pelaku pasar keuangan cenderung menolak pendekatan Keynesian (Chairman, 2007). Meskipun pemerintah dan perusahaan besar menerima konsep Keynesian, hal ini tidak terjadi karena dipaksa oleh kekuatan buruh, melainkan karena meningkatnya aktivitas ekonomi yang disertai dengan tingkat keuntungan yang tinggi di Amerika Serikat dan negara-negara besar Eropa di bawah paham ekonomi liberalisme sebelum perang. Pemikiran Keynesianisme sebagai suatu ideologi mencerminkan kondisi nyata kapitalisme setelah Perang Dunia Kedua. Namun, penerapan Keynesianisme dalam praktik ekonomi baru diuji ketika krisis ekonomi serius pertama dalam 40 tahun terjadi pada pertengahan 1970-an, yang dikenal sebagai stagflasi. Ketika itu, ekonom Keynesian seperti Francis Cripps mengakui bahwa tidak ada yang benar-benar memahami bagaimana ekonomi modern beroperasi (Chairman, 2007).

Kembalinya pandangan liberalisme klasik bisa diamati melalui kontribusi dua pemenang Nobel, yaitu Friedrich von Hayek (1899-1992) dan Milton Friedman (1912-2006). Bukan hanya sekadar konsepsi teoritis, prinsip-prinsip liberalisme klasik juga diimplementasikan dalam kebijakan ekonomi domestik, terutama di Inggris di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Margaret Thatcher dan secara serentak di Amerika dengan Ronald Reagan. Oleh karena itu, kebangkitan neoliberalisme sering kali disandingkan dengan neokonservatisme, terutama karena Thatcher yang berasal dari partai konservatif memimpin gerakan ini di Inggris. Dukungan dari Inggris dan Amerika

mendorong penyebaran ide-ide neoliberalisme secara global, tercermin dalam kebijakan ekonomi internasional yang diadopsi oleh lembaga-lembaga seperti IMF, WTO, dan Bank Dunia (Chairman, 2007).

Pada saat kapitalisme mencapai tahap di mana tujuan utamanya, yaitu akumulasi modal, tidak dapat lagi dipenuhi dengan cara yang telah melayani dengan baik sebelumnya, ideologi ini meninggalkan kompromi Keynesian yang menghadapi penurunan tingkat keuntungan. Bergeserlah keyakinan menuju pandangan bahwa neoliberalisme dapat meningkatkan laba dan akumulasi modal. Dalam fase awal kebangkitan ini, konsep-konsep lama seperti monetarisme yang dipegang teguh oleh Milton Friedman menjadi fokus sentral. Friedman menyatakan bahwa ada kelemahan dalam sistem pasar bebas yang disebabkan oleh ketidakmampuan pemerintah untuk mengontrol pasokan uang. Namun, versi pasar bebas ini juga terbukti tidak dapat beroperasi dalam jangka waktu yang singkat, kurang dari satu dekade. Oleh karena itu, perhatian beralih ke versi pasar bebas yang diusulkan oleh von Hayek dan Robert Lucas, yang bahkan lebih menonjol daripada intervensi negara yang diusulkan oleh Friedman. Pendekatan kembalinya pasar bebas yang diadvokasi oleh Friedman dan Hayek tampaknya memberikan solusi. Keduanya berpendapat bahwa ekonomi akan mampu menyelesaikan masalahnya sendiri jika dibebaskan dari distorsi pasar yang disebabkan oleh campur tangan negara atau campur tangan serikat pekerja terhadap fleksibilitas pasar tenaga kerja. Perdagangan bebas dianggap akan mencegah terjadinya monopoli nasional yang dapat merusak harga, dan pengangguran akan tetap berada pada tingkat alami yang diperlukan untuk mencegah upah merusak keuntungan.

B. Konsep Neoliberalisme

Neoliberalisme adalah sebuah ideologi ekonomi yang muncul di tengah abad ke-20, yang menekankan pada deregulasi, liberalisasi perdagangan, dan pengurangan intervensi pemerintah dalam ekonomi. Neoliberalisme berasal dari pemikiran ekonomi klasik, tetapi dengan penekanan yang lebih besar pada pasar bebas dan pembukaan ekonomi global. Ideologi ini mencakup prinsip-prinsip seperti:

- **Pasar Bebas:** Neoliberalisme menekankan pada ide bahwa pasar bebas adalah cara terbaik untuk mencapai kesejahteraan ekonomi. Ini mencakup pengurangan regulasi pemerintah dan pembatasan terhadap kemampuan perusahaan untuk bersaing.
- **Pembukaan Perdagangan:** Neoliberalisme mendorong pembukaan perdagangan internasional dan pengurangan barrier perdagangan. Ini bertujuan untuk memaksimalkan manfaat ekonomi dari perdagangan global.
- **Privatisasi:** Neoliberalisme mendorong privatisasi sektor-sektor ekonomi yang sebelumnya dikontrol oleh pemerintah. Ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas.
- **Pengurangan Pembiayaan Pemerintah:** Neoliberalisme menekankan pada pengurangan pembiayaan pemerintah dan pengurangan pengangguran melalui liberalisasi pasar.

Konsep neoliberalisme, seperti yang digambarkan oleh David Harvey dalam karya "A Brief History of Neoliberalism", adalah sebuah teori ekonomi politik yang menawarkan pemikiran bahwa kesejahteraan manusia dapat ditingkatkan melalui pemberian kebebasan dan keterampilan kepada individu, dalam kerangka institusi yang ditandai oleh hak milik pribadi yang kuat, pasar bebas, dan perdagangan bebas. Negara memiliki peran untuk menciptakan dan menjaga kerangka institusi yang mendukung praktik kebebasan pribadi ini, termasuk dalam mengatur struktur militer, pertahanan, polisi, dan hukum untuk melindungi hak milik pribadi, bahkan dengan menggunakan kekerasan jika diperlukan.

Harvey menekankan bahwa intervensi negara dalam pasar hanya diperlukan jika pasar tidak berfungsi dengan baik dalam sektor-sektor seperti tanah, air, pendidikan, perawatan kesehatan, jaminan sosial, dan lingkungan, di mana negara harus menciptakan pasar melalui intervensi. Namun, Harvey juga mengingatkan bahwa di luar kondisi tersebut, negara seharusnya tidak terlibat dalam intervensi pasar, karena kepentingan kelompok yang kuat dapat mengarah pada distorsi dan bias dalam intervensi negara, terutama dalam negara yang menganut sistem demokrasi. Pemahaman Harvey tentang neoliberalisme menekankan bahwa ini bukanlah sekadar kelanjutan dari liberalisme, tetapi sebuah ideologi independen yang lebih menekankan pada prinsip-prinsip ekonomi politik praktis daripada ideologi politik yang lengkap.

Anna Maria Blomgren juga menjelaskan konsep neoliberalisme dengan menekankan keragaman pemikiran internal di dalamnya. Neoliberalisme tidak hanya dilihat sebagai sebuah filsafat politik yang menekankan kebebasan individu dan hak milik pribadi. Blomgren menekankan bahwa neoliberalisme adalah sebuah konsep yang kompleks, meliputi landasan etika dan kesimpulan normatif. Terdapat juga perdebatan antara "liberalisme-anarko" yang mengadvokasi *laissez-faire* yang lengkap dan penghapusan semua pemerintahan, sementara liberalisme klasik menganggap pemerintahan memiliki peran yang lebih besar daripada hanya menjadi "negara penjaga malam" (Blomgren 1997:224). Berdasarkan beberapa definisi konsep neoliberalisme yang telah dijelaskan sebelumnya, neoliberalisme dapat didefinisikan sebagai sebuah keyakinan politik yang membatasi peran negara secara longgar, dengan fokus utama pada perlindungan individu dalam berbagai aspek, seperti bidang komersial, kepemilikan pribadi, privatisasi, dan kebebasan sipil. Konsep ini menegaskan bahwa satu-satunya tujuan yang sah bagi negara adalah untuk memastikan perlindungan tersebut. Dengan demikian, konsep neoliberalisme membawa konsekuensi terhadap kekuatan pemerintah dalam suatu negara, di mana negara diharapkan untuk mengurangi dan meminimalisir perannya. Pendekatan neoliberalisme ini kemudian diadopsi dalam perekonomian, di mana mekanisme pasar dianggap sebagai cara terbaik untuk mengatur transaksi barang dan jasa, dengan memastikan perlindungan terhadap kebebasan dan hak kepemilikan komersial yang sama bagi semua pihak.

C. Neoliberalisme Menurut Para Ahli

Menurut Johanna Bockman (Bockman 2013, 14), asumsi dasar dari neoliberalisme adalah bahwa pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan akan dihasilkan oleh perusahaan swasta dan pasar bebas. Neoliberalisme menolak gagasan tentang peran negara dalam menciptakan kesejahteraan, menganggapnya tidak efektif karena pemerintah dianggap tidak mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi atau menyediakan kesejahteraan sosial. Menurut pandangan ini, campur tangan pemerintah dalam masalah ekonomi justru akan menyebabkan kemunduran ekonomi yang pada akhirnya akan berdampak pada ketidaksejahteraan sosial.

Johanna Bockman (Bockman 2013, 15) juga mencatat bahwa dalam beberapa waktu terakhir, istilah "neoliberal" telah diperluas untuk mencakup berbagai bidang, termasuk korporatisasi universitas, pergeseran kebijakan kesejahteraan menuju filantropi dan kewirausahaan, meningkatnya "pengawasan intensif", privatisasi perusahaan-perusahaan negara, ekspansi pekerjaan rendah-upah di sektor layanan, pertumbuhan penahanan massal, dan fenomena budaya lainnya. Semua ini terkait dengan transformasi kapitalisme global.

Neoliberalisme juga sering berfungsi sebagai indikator dari tatanan politik-ekonomi global (Ganti, 2014), yang menuntut integrasi penuh dalam pasar bebas.

Menurut Bockman (Bockman 2013, 15), krisis utang telah menjadi pendorong bagi percepatan neoliberalisme di banyak negara di seluruh dunia. Lembaga donor seperti IMF adalah alat untuk "mendorong" negara-negara berkembang untuk mengadopsi "kebijakan penyesuaian struktural" yang didasarkan pada Konsensus Washington sebagai syarat untuk pinjaman baru dalam upaya menyelamatkan ekonomi. Konsensus ini melibatkan Bank Dunia, IMF, dan Departemen Keuangan AS. Dengan kata lain, "neoliberalisme telah membentuk kebijakan di tingkat internasional, nasional, dan lokal" (Bockman 2013, 14).

Menurut (Chairman, 2007) neoliberalisme bertujuan untuk mengurangi campur tangan pemerintah dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui mekanisme pasar yang alami. Sebagai suatu ideologi, neoliberalisme juga diartikan sebagai bentuk baru dari liberalisme. Di Eropa, liberalisme sering diasosiasikan dengan ekonomi pasar bebas, berbeda dengan pandangan di Amerika Utara. Neoliberalisme dianggap sebagai sebuah aliran yang memiliki tujuan khusus, yaitu mengurangi intervensi negara dalam urusan ekonomi dan menggantikannya dengan mekanisme pasar. Dalam paradigma neoliberalisme, pasar dianggap sebagai satu-satunya cara atau sistem untuk mengelola perekonomian dan menjadi ukuran tunggal dalam menilai keberhasilan kebijakan pemerintah (Deliarnov, 2006). Ketika masalah muncul, seperti monopoli alami terutama di sektor tenaga kerja, yang menghambat pergerakan harga dan upah serta memengaruhi pasokan dan permintaan secara keseluruhan, intervensi negara dipandang sebagai sesuatu yang merusak ekonomi dan harus dibatasi untuk melindungi hak milik pribadi, terutama dalam konteks pertahanan nasional. Selain itu, dalam kerangka neoliberalisme, campur tangan negara dalam hal kebijakan moneter sering dianggap berlebihan karena terlalu memantau jumlah uang yang beredar.

D. Prinsip Neoliberalisme

Menurut jurnal Education and Government, neoliberalisme adalah ideology yang didasarkan pada prinsip-prinsip seperti mengutamakan penanaman modal asing dalam negeri, menyeimbangkan penanaman modal dalam dan luar negeri, legalisasi izin usaha, dan nasionalisasi penanaman modal asing. Hal ini membuat perekonomian suatu negara lebih maju, namun menimbulkan krisis di negara lain di dunia. Namun tidak hanya prinsip-prinsip ini, tetapi masih ada beberapa ahli lainnya yang membahas mengenai prinsip-prinsip neoliberalisme, diantaranya:

Menurut Giersch, 1961. Neoliberalisme sebagaimana terangkum dalam ordoliberalisme, merupakan sistem ekonomi yang dibangun berdasarkan tiga prinsip:

1. Tujuan utama ekonomi neoliberalisme adalah pengembangan kebebasan individu untuk bersaing sepenuhnya secara bebas di pasar.
2. Kepemilikan pribadi atas faktor-faktor produksi diakui.
3. Terbentuknya harga pasar tidak bersifat alamiah, melainkan merupakan hasil pengaturan pasar oleh negara melalui penetapan undang-undang.

Selain itu ada empat prinsip neoliberalisme menurut Rachel S. Turner dalam Poespartodojo dan seran, 2016. Diantaranya yaitu:

1. Keyakinan bahwa pasar dapat mengatur dirinya sendiri tanpa intervensi pihak luar seperti politik, agama negara, dan sebagainya.
2. Keyakinan akan negara hukum dan pemerintahan berdasarkan hukum (rechstaat)
3. Keyakinan untuk melakukan intervensi.
4. Sebagaimana individu kepercayaan terhadap hak milik pribadi sebagai pengakuan terhadap hak-hak dasar masyarakat.

E. Contoh Teori Neoliberalisme

1. Deregulasi dan Debirokratisasi.

Program deregulasi dan debirokratisasi menyebabkan berkurangnya campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Contoh neoliberalisme yang pertama adalah pengurangan atau pengurangan intervensi pemerintah. Menurut Teori Neoliberalisme, peningkatan intervensi pemerintah dalam perekonomian memperlambat pertumbuhan ekonomi di negara-negara yang terlibat. Hal itu merupakan pendapat dari para pakar pendukung neoliberalisme seperti Anne O Kruger, Bela Balasa dan Jagdish Bhagwati.

2. Privatisasi BUMN

Privatisasi adalah penjualan sebagian saham atau aset BUMN kepada pihak swasta. Program privatisasi BUMN di Indonesia terus berlanjut sejak diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 1988 yang disusul dengan Keputusan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Privatisasi BUMN. Kebijakan ini dilaksanakan sebagai bagian dari program deregulasi dan debirokratisasi nasional untuk melakukan privatisasi atau privatisasi BUMN. Untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan pelayanan publik. Penjualan BUMN ke perorangan cukup banyak, termasuk penjualan badan usaha yang berdampak pada hajat hidup orang banyak. Contohnya adalah Perusahaan rumah sakit, sekolah, listrik, air, transportasi, pertambangan, dan perusahaan perbankan. Sektor swasta dipandang sebagai pemain tunggal yang kompatibel dalam perekonomian dan diharapkan mampu bersaing di dunia.

Beberapa contoh Perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) :

- PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk: Telkom Indonesia merupakan perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia yang sebagian besar dimiliki oleh pemerintah. Namun, seiring dengan kebijakan privatisasi, pemerintah menjual sebagian saham Telkom ke investor swasta dan masyarakat melalui penawaran umum saham (IPO).
- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk: Bank Mandiri awalnya merupakan gabungan dari empat bank BUMN yang digabungkan menjadi satu bank pada tahun 1998. Seiring berjalannya waktu, Bank Mandiri mengalami proses privatisasi dan sebagian sahamnya dimiliki oleh investor swasta.
- PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk: Garuda Indonesia adalah maskapai penerbangan nasional Indonesia yang telah menjalani proses restrukturisasi dan privatisasi. Beberapa saham Garuda Indonesia telah dijual kepada investor swasta untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan.

3. Free Trade (Pasar Bebas)

Pasar bebas merupakan suatu bentuk pasar di mana segala bentuk kebijakan ekonomi tidak dijadikan patokan dalam melakukan jual-beli. Adam Smith, juga mengartikan pasar bebas sebagai suatu sistem ekonomi di mana seluruh kegiatan ekonomi mulai dari produksi, distribusi, dan konsumsi diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar tanpa campur tangan pemerintah atau pihak lain. Contoh pasar bebas adalah penggunaan regulasi untuk mengurangi atau menghilangkan bea masuk dan ekspor antar negara atas berbagai jenis barang. Biasanya, struktur perjanjian ini didasarkan pada perjanjian bilateral, regional atau multilateral. Contohnya ialah penciptaan ASEAN Free Trade Area,

kawasan perdagangan bebas untuk meningkatkan daya saing ekonomi negara-negara anggota ASEAN.

Beberapa contoh pasar bebas yang terdapat di Indonesia yaitu :

- Pada pasar keuangan yaitu terdapat bursa saham, pasar obligasi, dan pasar valuta asing (forex)
- Industri telekomunikasi : Industri telekomunikasi di Indonesia, termasuk penyedia layanan telepon seluler, internet, dan televisi kabel, juga merupakan contoh pasar bebas di mana perusahaan lokal seperti Telkomsel, XL Axiata, dan Indosat Ooredoo bersaing dengan operator asing seperti Huawei, Samsung, dan lainnya.
- Industri Pariwisata: Sektor pariwisata di Indonesia juga mencerminkan pasar bebas di mana berbagai penyedia layanan pariwisata seperti hotel, restoran, agen perjalanan, dan atraksi wisata bersaing untuk menarik wisatawan lokal dan mancanegara.
- Industri Makanan dan Minuman: Industri makanan dan minuman di Indonesia juga merupakan contoh pasar bebas di mana berbagai merek lokal dan internasional bersaing untuk mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar. Contoh perusahaan seperti Indofood, Unilever, Nestle, dan Coca-Cola bersaing dalam industri ini.

4. Komersialisasi Pendidikan Mulai dari Sekolah Dasar (SD) yang bergelar RSBI sampai Perguruan Tinggi Negeri (PTN)

Komersialisasi pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi negeri (PTN) bergelar RSBI merupakan bagian dari pandangan pendidikan neoliberal. Neoliberalisme mendukung privatisasi sektor pendidikan, dan hal ini dapat tercermin dalam konsep RSBI di sekolah dasar. Program RSBI memungkinkan sekolah beroperasi secara semi-otonom dan mengenakan biaya tetap kepada siswa untuk mengakses kurikulum yang dianggap lebih baik atau lebih internasional. Hal ini sejalan dengan gagasan deregulasi, dimana pemerintah memberikan kontrol lebih besar terhadap pendidikan kepada sekolah dan organisasi swasta. Di sisi lain, neoliberalisme di tingkat universitas negeri juga dapat tercermin dalam langkah-langkah yang mendukung pengembangan pendanaan swasta, seperti sponsorship perusahaan dan sumbangan swasta. Universitas juga dapat mengembangkan program yang menarik bagi pelajar internasional atau pelajar yang bersedia membayar biaya lebih tinggi untuk program tertentu. Contoh komersialisasi Pendidikan yang ada di Indonesia sendiri diantaranya ialah sekolah swasta dengan biaya tinggi, les privat dan bimbingan belajar berbayar, program Pendidikan internasional dengan biaya mahal, kursus Bahasa, seni, dan olahraga berbayar, dan perguruan tinggi dengan biaya kuliah tinggi. Hal tersebut menciptakan kesenjangan akses terhadap Pendidikan tinggi bagi Masyarakat dengan tingkat ekonomi yang berbeda.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Neoliberalisme merupakan sebuah ideologi ekonomi yang lahir sebagai respons terhadap kegagalan kebijakan ekonomi intervensionis pada masa lalu. Dengan menekankan deregulasi, liberalisasi perdagangan, dan peran pemerintah yang terbatas, neoliberalisme mengadvokasi pasar bebas dan hak milik pribadi sebagai sarana untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Kontribusi para ahli seperti Milton Friedman dan Friedrich Hayek telah memberikan landasan penting bagi pengembangan neoliberalisme, dengan fokus pada kontrol inflasi dan kebebasan pasar. Namun, sementara neoliberalisme dianggap mampu meningkatkan efisiensi ekonomi, kritik juga muncul terhadap dampaknya terhadap ketimpangan sosial dan pengurangan peran negara dalam menyediakan jasa publik. Oleh karena itu, sementara neoliberalisme telah menjadi paradigma ekonomi yang dominan, perdebatan terus berlanjut mengenai manfaat dan dampak dari penerapan prinsip-prinsip neoliberal dalam kehidupan sosial dan politik.

B. Saran

Diperlukan suatu pendekatan yang seimbang antara kebebasan individu dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan perlu diperhatikan juga dalam konteks liberalisme. Hal ini meliputi penguatan perlindungan sosial bagi kelompok rentan dan distribusi manfaat ekonomi yang adil. Dengan mempertimbangkan baik implikasi positif maupun negatif, penerapan prinsip-prinsip liberalisme secara bijaksana diharapkan dapat mencapai keseimbangan yang optimal antara kebebasan individu dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliya, L. (2020). Neoliberal dalam Globalisasi: Ketergantungan Negara Berkembang dalam Pasar Bebas Hanya Memperdalam Krisis Ekonomi Pandemi Virus Corona. *Konstruksi Pemberitaan Stigma Anti-China Pada Kasus Covid-19 Di Kompas. Com*, 68(1), 1-12.
- Baswir, R. 2015. Ekonomi Kerakyatan vs. Neoliberalisme. Gema Keadilan, Edisi Jurnal. vol.2, edisi.1.
- Caniago, S.A., 2010. Munculnya Neoliberalisme Sebagai Bentuk Baru Liberalisme. *Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan*, 14(2).
- Eppler, E. (2009). Melindungi Negara dari Ancaman Neoliberal. Jakarta: Friedrich-Elbert-Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia.
- Harahap, H. I. (2023). Neoliberalisme: Sebuah Konsep Pemerintahan Publik Swasta. *Jurnal Studi Pembangunan*, 2, 59.
- Hermawan, H. A. 2012. Neoliberalisme Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Media Ekonomi & Teknologi Informasi* 20(2).
- Nurhidayyat, I. 2023. Prinsip-Prinsip Good Governance Di Indonesia. *Jurnal E-Gov Wiyata: Education and Government*. Vol.01, No.1, Hal 40-52.
- Parmitasari, R. D. A., & Alwi, Z. (2020). Aliran Ekonomi Neoliberalisme: Suatu Pengantar. *Study of Scientific and Behavioral Management (SSBM)*, 1(3), 59-69.
- Pontoh, C. H., & Sangadji, A. (2021). *Neoliberalisme Konsep dan Praktik di Indonesia*. Pustaka indoPROGRES.
- Rizky, A., & Majidi, N. (2008). Neoliberalisme Mencengkeram Indonesia. Jakarta: E Publishing.
- SIMON UNTARA, H. Y. (2016). MENGKRITISI ARUS GLOBALISASI. SURABAYA: PT KANISIUS.
- Syihab, MB, & Utomo, YT (2022). Mengatasi Ancaman Pasar Bebas Pada Ketahanan Pangan Nasional Dengan Ekonomi Islam. *Jurnal Pemuda & Ekonomi Islam* , 3 (01s), 36-45.